

SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

Deni Juliyanto

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
deni.20211171@student.ubl.ac.id

Zainab Ompu Jainah

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
zainab.ompu@ubl.ac.id

ABSTRAK

Tingkat penyimpangan yang sangat memprihatinkan pada usaha penangkapan ikan sering ditemui baik oleh perorangan maupun korporasi yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal atau melawan hukum. Melalui analisis data sekunder dan wawancara dengan aparat penegak hukum, penelitian ini menemukan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan ilegal berdasarkan Undang-Undang Perikanan dapat dikenakan sanksi penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tahapan penegakan hukum pidana yang mempengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal atau melawan hukum

Kata Kunci: Criminal Sanctions, Illegal Fishing, Law Enforcement.

ABSTRACT

The very concerning level of deviation in fishing efforts is often found by both individuals and corporations that are carried out illegally or against the law. This study aims to determine the criminal sanctions and law enforcement against the crime of illegal or against the law fishing. Through secondary data analysis and interviews with law enforcement officers, this study found that the criminal sanctions for the crime of illegal fishing based on the Fisheries Law can be subject to a prison sentence of 10 years and a fine of IDR. 2,000,000,000 (Two Billion Rupiah). A qualitative approach is used to identify the stages of criminal law enforcement that influence the success of the law enforcement process against the crime of illegal or against the law fishing.

Keywords: Criminal Sanctions, Illegal Fishing, Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara bahari atau disebut juga dengan negara maritim, oleh karena seluruh kepulauan dari Sumatera sampai Papua (dari barat ke timur), beserta utara sampai selatan dikelilingi oleh dua samudera, yaitu hindia dan pasifik. Sementara satu pulau dengan pulau lainnya diapit oleh laut, selat, dan sungai-sungai.

Bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 km menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya